

KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI GOLKAR)

LEONARDUS DIANTO PRAKOSO

ABSTRAK

Riset ini mengkaji komunikasi partisipatif dalam penyusunan rancangan program partai politik dengan studi kasus Partai Golkar. Peneliti berfokus pada penerapan komunikasi partisipatif dalam penyusunan rancangan program Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian mengenai sejauh mana komunikasi partisipatif diterapkan dalam penyusunan rancangan program Partai Golkar merupakan hal yang belum banyak diteliti sebelumnya. Meskipun banyak penelitian yang membahas teori komunikasi dan partisipasi, kajian spesifik tentang penerapan komunikasi partisipatif oleh partai politik, terutama Partai Golkar, masih jarang ditemukan. Riset ini bertujuan mengetahui sejauh mana komunikasi partisipasi dalam penyusunan rancangan program partai politik dengan studi kasus Partai Golkar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara semi terstruktur sebagai data primer dan mengumpulkan data pada buku, dokumen, jurnal, dan media massa sebagai data sekunder yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa Partai Golkar telah menerapkan komunikasi partisipatif dalam proses penyusunan rancangan program partai tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Ditunjukkan dengan proses komunikasi dialogis telah terjalin antara masyarakat, struktur partai, dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar. Akan tetapi, pada saat proses pengambilan keputusan masyarakat dan struktur di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT/RW tidak dilibatkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan narasumber dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dalam proses penyusunan rancangan program partai pengambil keputusan hanya dilakukan di tingkat DPD Kota Adm. Jakarta Selatan tanpa melibatkan struktur yang dibawahnya. Disamping itu, narasumber juga menyadari pentingnya sebuah komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat guna menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih ideal dan menjalankan fungsi partai politik sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang.

Kata kunci: Komunikasi Partisipatif, Partai Politik, Partai Golkar

Participatory Communication in the Formulation of Political Party Program Plans (A Case Study of the Golkar Party)

LEONARDUS DIANTO PRAKOSO

ABSTRACT

This study examines participatory communication in the formulation of political party programs, using the Golkar Party as a case study. The research focuses on the application of participatory communication in the program planning process of the Regional Leadership Council (DPD) of the Golkar Party in South Jakarta Administrative City. The extent to which participatory communication is implemented in the party's program development remains an underexplored area in existing literature. Although numerous studies discuss communication and participation theories, specific research on the practical application of participatory communication within political parties—particularly the Golkar Party—is still limited. This research aims to explore the extent of participatory communication employed in the program development process of a political party, with Golkar Party as the case study. A qualitative method with a case study approach was used in this research. Data were collected through semi-structured interviews as the primary source, supported by secondary sources such as books, official documents, journals, and mass media. The findings indicate that the Golkar Party has implemented participatory communication in the formulation of its party programs; however, its execution remains suboptimal. Dialogic communication has been established among the community, party structures, and members of the Jakarta Provincial Parliament from the Golkar Party. Nevertheless, during the decision-making process, community members and lower-level party structures at the Kecamatan, Kelurahan, and RT/RW were excluded. This is supported by statements from the interviewees, who confirmed that decisions during program planning are made solely at the city-level DPD without involving subordinate structures. Furthermore, the informants acknowledged the importance of communication that actively engages the public in order to foster a more ideal democratic ecosystem and fulfill the political party's function as mandated by law.

Keywords: Participatory Communication, Political Party, Golkar Party.